

BAB V

KESIMPULAN

Pertama, menurut letaknya Magelang terletak antara 110° - 01' - 51" Bujur Timur dan 110° - 26' - 56" Bujur Timur dan 7° - 19' - 13" Lintang Selatan dan 7° - 42' - 14" Lintang Selatan, dengan batas-batas yaitu sebelah Utara Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang, sebelah Timur Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Semarang, sebelah Selatan Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Sleman (DIY), sebelah Barat Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo.

Secara administratif berdasarkan letaknya termasuk daerah yang berada di tengah-tengah pulau Jawa. Seperti daerah yang lain, Magelang merupakan suatu Kabupaten dan Kotamadya yang berada pada Karisidenan Kedu dan menjadi Kota pusat dari Karisidenan ini. Yang meliputi 5 Kabupaten dan 1 Kotamadya, yaitu Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Kebumen dan Kotamadya Magelang sebagai pusat administrasi dan pemerintahan Karisidenan Kedu.

Berdasarkan hal tersebut, Magelang merupakan kota yang cukup strategis karena menjadi jalur utama penghubung kota-kota besar di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejak jaman penjajahan Jepang Magelang terkenal sebagai kota *Garnisun* atau kota militer, sehingga pada waktu Agresi Militer Belanda I dan II selalu berusaha untuk dapat menduduki kota Magelang. Hal ini dapat di buktikan dengan banyaknya peninggalan bangunan-bangunan militer sebagai pemusatan pasukan Jepang. Dengan segala upaya Belanda berusaha menguasai Magelang karena

dengan di kuasanya magelang maka pasukan Belanda akan dengan mudah untuk maju membantu pasukannya yang berada di Yogyakarta.

Selain itu Magelang termasuk daerah dataran tinggi karena ketinggiannya menjapai 360 m di atas permukaan laut dan juga diapit 4 gunung yaitu Gunung Sindoro, Sumbing dan Gunung Merapi, Merbabu. Dengan relief dataran Magelang yang terdiri dari bukit-bukit memungkinkan untuk melakukan gerilya karena daerah ini sulit di jangkau pasukan Belanda. Daerah-daerah ini meliputi daerah Windusari, Kajoran, Kaliangkrik, Grabag, Ngablak, dan Sawangan. Daerah Magelang kondisi tanahnya yang subur serta di dukung dengan curah hujan yang tinggi dan iklim yang menguntungkan tiap tahunnya. Di samping itu juga Magelang di kelilingi pegunungan-pebunungan yang membujur dari Utara ke Selatan di sebelah Barat dan Timur Magelang sehingga banyak menghasilkan sayur-sayuran dan buah-buahan seperti di daerah Sawangan, Pakis, Kajoran, Kaliangkrik, dan Grabag. Sedangkan daerah Selatan Magelang sangat cocok untuk daerah pertanian dikarenakan tempat dan lokasinya berada di bawah lereng gunung Merapi, dan masyarakat dapat memanfaatkan abunya sebagai pupuk. Adapun daerah-daerah ini meliputi Sawangan, dan Salam serta daerah yang langsung berbatasan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Terbentuknya Tentara Pelajar diilhami oleh ikrar para pelajar yang dilaksanakan di Solo dan Surabaya. Pada Bulan Juli 1945, ikrar para pemuda di Kota Surabaya dilaksanakan di Gedung “Hosyo-Kyoku” dihadiri oleh pelajar-pelajar SMP dan SMA. Salah seorang pelajar bernama Soebiantoro dari Sekolah Menengah

Teknik 49 mengajak pada para pelajar untuk mempertahankan dan membulatkan tekad menghadapi perjuangan.

Pada bulan September 1945 para pelajar Magelang membentuk Gabungan Sekolah Menengah yang beranggotakan pelajar-pelajar Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Teknik Pertama, Sekolah Guru Bawah maupun Atas atau Sekolah Guru Negeri, dan Sekolah Pertanian di Mertoyudan. Pusat kegiatan berada di dua tempat yaitu Gedung Mosvia berada di sebelah Selatan Alon-Alon dan SMP Negeri 1 Magelang.

Akhirnya di Bulan Desember 1945, Gabungan Sekolah Menengah harus melebur dengan Ikatan Pelajar Indonesia Kedu setelah ada perintah dari Yogyakarta berdasarkan Konggres Pelajar di Madiun. Kegiatan-kegiatan pelajar sebelum dan sesudah bergabung tidak mengalami perubahan, yaitu melakukan kegiatan-kegiatan rutin bela negara, saling memberikan informasi perkembangan politik negara dan pergerakan pasukan Belanda, latihan bersama bongkar pasang senapan hingga menembak, dan latihan baris berbaris di Lapangan Rindam Magelang dan Tuguran.

Selanjutnya berdasarkan pertimbangan bahwa jasa para pelajar yang berjuang turut diakui statusnya sebagai anggota kesatuan organik secara resmi, perlu adanya suatu wadah induk kesatuan, supaya tidak dianggap sebagai kesatuan tentara liar. Adanya induk wadah tersebut, dengan demikian Pemerintah dapat mengetahui berapa jumlah pelajar yang turut serta berjuang dengan maksud dapat member bantuan logistik atau bantuan lainnya. Munculnya Brigade khusus tentara pelajar dengan nama Brigade XVII, adanya reorganisasi dan rasionalisasi dalam APRI

sebagai realisasi penetapan Presiden Nomor 14 tahun 1948 tanggal 14 Mei 1948 yang menyebutkan divisi-divisi dan brigade-brigade baru yang berdiri sendiri maka terbentuklah brigade Tentara Pelajar yang langsung berada di bawah pimpinan Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia Jendral Soedirman. Panglima Markas Besar Komando Djawa (MBKD), Kolonel A.H. Nasution menunjuk Mayor Soedarto sebagai Komandan Brigade 17/TNI. Pangkatan kemudian dinaikkan Letnan Kolonel berdasarkan surat keputusan Presiden dan di tandatangani oleh Presiden. Brigade ini diresmikan pada tanggal 17 November 1948 di Kepatihan Yogyakarta. Kesatuan ini tersebar di seluruh Jawa dan diresmikan berdirinya tanggal 17 November 1948.

Kedua, Pada tanggal 19 Desember 1948, pasukan Belanda melakukan penyerangan ke Yogyakarta yang terkenal dengan nama Agresi Militer Belanda Kedua. Bersamaan itu, pasukan Belanda yang berkedudukan di Gombong sejak Agresi Militer Belanda Pertama bergerak menuju Purworejo. Dalam perjalannya memasuki wilayah Republik Indonesia, pasukan Belanda tidak mendapatkan perlawanan dalam bentuk apapun. Hal ini dikarenakan berlakunya system *Wehrkreise* yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota TNI dan dilarang melakukan perlawanan dalam bentuk apapun sehingga dapat mengurangi korban jiwa penduduk sipil. Dengan demikian, pasukan TNI yang sudah siap melakukan persiapan penghadangan sejak bulan November 1948 di sepanjang jalan yang menghubungkan antara kabupaten Purworejo dengan kabupaten Kebumen ditarik kembali menuju daerah perjuangan masing-masing.

Walaupun demikian perjalanan pasukan Belanda tidak berjalan mulus seperti yang mereka duga. Hambatan-hambatan berupa ranjau darat, dan batang-batang pohon yang merintang di sepanjang jalan utama. Tujuan pemasangan ini adalah untuk menghambat perjalanan musuh yang sedang menuju Purworejo. Akibatnya beberapa kendaraan perang seperti tank dan truk yang mengangkut pasukan Belanda tidak dapat melanjutkan perjalanan karena terkena ranjau darat. Untuk mengurangi permasalahan tersebut, sebagian pasukan diterjunkan guna menjinakkan ranjau darat dan menyingkirkan batang-batang pohon yang merintang dan menghalangi jalan. Jadi pasukan Belanda terhambat dalam perjalanannya menuju Purworejo dan memberi kesempatan TNI untuk menyingkir ke daerah pedalaman.

Untuk menghadapi kemungkinan masuknya pasukan Belanda ke Magelang, pada hari itu pula pejabat-pejabat sipil ataupun militer mengadakan pertemuan di Aula Kantor Kabupaten Magelang, di dalam pertemuan itu dihadiri oleh Raden Moekhahar Ronohadiwidjojo, Walikota Magelang Raden Joeddodibroto, Bupati Magelang Patih Sumarsono, Letnan Kolonel A. Yani, dan Letnan Kolonel Moh. Sarbini. Berdasarkan hasil keputusan pertemuan itu, pejabat-pejabat pemerintahan sipil maupun militer telah menyetujui, bahwa belum pasukan Belanda menduduki Kotapraja Magelang, maka tindakan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Sebelum meninggalkan Kotapraja Magelang usahakan semua gedung-gedung yang dianggap paling penting hendaknya untuk dibumi hanguskan, tanpa ada yang tertinggal. Hal ini dikarenakan agar tidak dijadikan tempat pertahanan ataupun markas pasukan Belanda.

2. Pasukan Belanda memasuki Magelang, keadaan harus sudah sepi dari aktivitas pemerintah sipil ataupun militer. Tujuannya untuk mengurangi atau menghindari korban di pihak penduduk sipil lebih banyak dan merupakan strategi politik maupun militer Republik Indonesia dalam menghadapi militer Belanda.
3. Seluruh pejabat TNI, pemerintah Militer ataupun pemerintah sipil yang masih loyal kepada Pemerintah Republik Indonesia bersama-sama penduduk desa di daerah pedalaman membentuk kantong-kantong gerilya dan mengobarkan semangat perlawanan rakyat semesta dalam menghadapi pasukan Belanda.
4. Khusus TNI maupun Kesatuan rakyat yang tergabung dalam perjuangan dilarang melakukan perlawanan balasan dalam bentuk apapun sebelum ada komando dari pusat.

Kondisi geografis Magelang yang bergunung-gunung dan berbukit-bukit maka akan mempermudah mengatur strategi pertahanan dan perlawanan rakyat terhadap Belanda. Para pejuang Magelang melakukan perlawanan dengan bergerilya dari satu daerah ke daerah yang lain. Di semua perbukitan dan pegunungan serta daerah-daerah atau dusun-dusun yang agak tinggi digunakan sebagai tempat bergerilya pasukan TNI maupun badan-badan kelaskaran. Selama berada di tempat-tempat itu mereka mendapat makanan dari para penduduk, tetapi seadanya. Cukup hanya nasi dengan sayur nangka tanpa lauk. Minum juga tidak selalu air rebusan tetapi kadang dari air sungai.

Daerah Magelang dibagi menjadi 2 medan pertahanan, yaitu medan Pertahanan Barat (tertutup) dan medan pertahanan timur (terbuka). Pembagian ini

didasarkan pada letak geografis daerah Magelang dan pemusatan pemerintah sipil maupun militer sehingga dapat diketahui letak konsentrasi kekuatan TNI. Pertama, medan pertahanan barat daerahnya adalah sepanjang sungai Progo yang mengalir ke arah selatan, meliputi kecamatan Bandongan, Windusari, Kajoran yang terletak di lereng gunung Sumbing, dimana banyak pegunungan yang saling berdekatan sehingga sangat bermanfaat untuk tempat perlindungan dari serangan pesawat terbang maupun meriam. Kedua, medan pertahanan timur cenderung bersifat terbuka karena daerah ini jarang terdapat hutan yang tumbuh di daerah pegunungan seperti di daerah pertahanan barat. Daerah ini meliputi kecamatan Tegalrejo, Pakis, Candimulyo, Srumbung, dan Grabag. Hal ini dibuktikan dengan pasukan Belanda apabila hendak mengadakan patroli biasanya melewati daerah Muntilan atau Grabag sebab jembatan sungai Elo yang menghubungkan antara kota Magelang dengan kawedanan Tegalrejo dan sekitarnya setelah diputus oleh TNI.

Ketiga, Belanda berhasil menduduki Magelang selama kurang lebih satu tahun (Desember 1948 sampai dengan Desember 1949). Selama itu Belanda berhasil mengaspal jalan-jalan protokol yang sudah rusak sejak pendudukan Jepang, memperbaiki jembatan sungai Progo yang telah dihancurkan oleh pasukan TNI dan penduduk, dan merehabilitasi beberapa gedung yang mereka tempati, serta membuka kembali beberapa sekolah.

Sementara itu permasalahan Indonesia-Belanda tengah menjadi pembicaraan yang hangat di dunia internasional. Sehari sesudah Belanda memulai penyerangannya, 20 Desember 1948, wakil AS di Dewan Keamanan PBB minta supaya Dewan

meyelenggarakan sidang darurat. Dewan Keamanan mulai bersidang pada 22 Desember 1948 dan membicarakan usul resolusi bersama. Namun pihak Belanda menyatakan bahwa masalah yang terjadi di Indonesia merupakan masalah dalam negeri Kerajaan Belanda sendiri dan tidak boleh negara lain mencampurinya. Pada tanggal 28 Januari 1949, PBB menerima baik resolusi yang diajukan oleh Amerika Serikat, Cina, dan Cuba. Resolusi tersebut dalam garis besarnya berisi anjuran kepada Republik Indonesia dan Belanda untuk menghentikan tembak-menembak, pembebasan semua tawanan politik dan dikembalikannya pembesar Republik Indonesia ke Jogjakarta serta pengembalian Jogjakarta pada Republik Indonesia

Pasukan Belanda ditarik dari kota Jogjakarta mulai tanggal 24-29 Juni 1949 dan TNI pada tanggal 29 Juni 1949 mulai memasuki kota, tetapi di daerah-daerah selain Jogjakarta tetap masih terjadi pertempuran-pertempuran termasuk di Magelang. Setelah kota Jogjakarta dikuasai penuh oleh TNI, maka pada tanggal 6 Juli 1949 Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muh. Hatta kembali ke Jogjakarta. Penghentian tembak-menembak baru terlaksana di seluruh Indonesia setelah ada perintah dari Presiden selaku Panglima Tertinggi Angkatan Perang RI melalui RRI Jogjakarta tanggal 3 Agustus 1949, dan perintah itu juga dilakukan oleh jenderal Soedirman Panglima Besar TNI.

Pada hari yang sama AHJ. Levink Wakil Tertinggi Mahkota Belanda sebagai Panglima Tertinggi Angkatan perang Belanda di Indonesia juga memerintahkan kepada serdadu-serdadunya untuk meletakkan senjata. Di Magelang untuk menyambut serah terima antara pihak Belanda kepada Indonesia, maka pemerintahan

sipil dan militer sepakat mengadakan konferensi untuk persiapan serah terima dari militer ke sipil. Saat itu Bupati Magelang menggunakan rumah haji Marzuki di dusun Manggoran desa Bondowoso sebagai kantor pemerintahan sipil kabupaten Magelang. Selain digunakan sebagai kantor Pusat Pemerintahan Sipil Magelang, selama dua bulan H.A. Marzuki menjamin para pegawai dan pengungsi berupa nasi rangsum dua kali sehari. Pada awal mulanya Bupati Magelang ragu-ragu dalam melaksanakan tugas. Hal ini disebabkan karena adanya kabar bahwa atroli Belanda yang akan memasuki desa tersebut. Berkat saran Mayor Moerdiman yang mengatakan bahwa pada bulan Agustus 1949 antara pihak Indonesia dengan Belanda telah mengadakan gencatan senjata dan sebentar lagi akan diadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag. Sehubungan dengan itu secara otomatis pemerintah sipil terus mengambil alih dari pemerintahan militer. Hal ini sesuai dengan hasil konferensi Bondowoso. Dengan demikian semenjak memasuki kota Magelang, seluruh staf pemerintah sipil kabupaten maupun kota Magelang bertugas kembali.